

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi terhadap pemberdayaan masyarakat disabilitas masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari belum adanya program yang dikhususkan untuk proses pengembangan kemampuan para penyandang disabilitas. Adapun bantuan yang diberikan terhadap para penyandang disabilitas yang ada di Kota Bekasi hanya berfokus pada pemberian alat bantu untuk menunjang aktifitas keseharian para penyandang disabilitas, tentunya hal ini masih kurang optimal untuk mendorong kemampuan *softskill* masyarakat penyandang disabilitas untuk setidaknya memiliki kemampuan untuk tetap bersaing dengan masyarakat umum lainnya. Berikut adalah kesimpulan yang dapat dibuat penulis berdasarkan indikator teori yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Harapan (Hope)

Dalam harapan terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Bekasi pihak Dinas Sosial berharap bisa memberikan peranan yang jauh lebih besar namun untuk saat ini belum bisa terlaksana dikarenakan terkait dengan anggaran yang mereka miliki, sedangkan dalam hal ini pihak lainnya seperti Trainer Himpunan Wanita Disabilitas Indonesian (HWDI) dan penyandang disabilitas juga berharap bisa lebih diperhatikan dan akan adanya

program pengembangan kemampuan disabilitas sesuai dengan klasifikasi disabilitasnya.

2. Norma (Norm)

Berdasarkan indikator norma (*norm*) dalam teori peran milik biddle dan thomas (2015:229), dikatakan bahwa norma merupakan gambaran dari nilai yang telah disepakati bersama dari sekelompok individu sehingga bisa digunakan sebagai pedoman. Dalam hal ini menunjukkan bahwa nilai dari proses pemberdayaan yang disepakati dalam mendorong masyarakat penyandang disabilitas dalam memiliki hak yang sama layaknya masyarakat normal sehingga membuat adanya kesetaraan antar individu tanpa melihat adanya kekurangan yang dimilikinya.

3. Perilaku (Performance)

Dalam hal ini Dinas sosial secara peran tidak memiliki Program untuk peningkatan *softskill* bagi para penyandang disabilitas, namun mereka membuat program pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas. Adapun anggaran yang dimilikinya yaitu sebanyak 900 juta sampai 1 milyar rupiah. Dalam hal ini untuk program pemberdayaan *softskill* bagi para penyandang disabilitas akan dikaji terlebih dulu dan disiapkan anggarannya untuk diajukan kepada DPRD Kota Bekasi.

4. Evaluasi (Evaluation)

Dalam proses evaluasi program bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Bekasi Pihak Dinas Sosial mengakui masih banyak kekurangan dan sebenarnya menginginkan untuk membantu para penyandang disabilitas dengan jauh lebih baik lagi, namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki seperti anggaran dan fokus lainnya hal itu belum bisa tercapai dan terlaksana

5. Sanksi (Sanction)

Tentunya dalam hal ini pihak Dinas Sosial harus bertanggungjawab dalam upaya peningkatan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Bekasi, penyandang disabilitas dalam hal ini tidak memiliki program pemberdayaan dikarenakan pihak Dinas Sosial tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pemberdayaan tersebut. Tentunya sanksi yang tepat adalah mendorong pihak Dinas Sosial dalam menciptakan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas sebab itu merupakan bagian dari tanggungjawab mereka.

5.2 Saran

Dalam hal ini peneliti hanya mampu memberikan saran agar nantinya Dinas Sosial mampu membuat program pengembangan penyandang disabilitas berdasarkan klasifikasi disabilitas yang ada sehingga proses pengembangan kemampuan yang akan diberikan bisa saling memiliki fokus dan arah tujuan. Selain itu semoga Dinas Sosial mulai merancang anggaran untuk pengembangan kemampuan para penyandang disabilitas tersebut dan apabila belum bisa dilakukan diharapkan untuk Dinas Sosial memberikan dorongan terhadap para anggota DPRD Kota Bekasi untuk mulai mendorong rancangan pemberian anggaran lebih untuk

program pengembangan para penyandang disabilitas di Kota Bekasi sehingga nantinya program-program tersebut bisa terealisasi dan kesetaraan antara penyandang disabilitas dan masyarakat normal bisa dicapai dan bukan hanya sebagai angan-angan saja.